PENGUATAN LEMBAGA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA LIPATKAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / LPM)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program
Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

BIMA ALPAJRI
NPM.170411011

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
(UNIKS)
TELUK KUANTAN
2022

ABSTRAK

PENGUATAN LEMBAGA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA LIPATKAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

OLEH:

BIMA ALPAJRI
NPM. 170411011

Pemerintah Desa merupakan unit pelayanan terdepan bagi masyarakat dan merupakan hal utama bagi keberhasilan semua program. Oleh karena itu, penguatan desa merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditunda-tunda dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah dan kemandirian desa. Keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, terutama peran pemerintah desa itu sendiri. Sedangkan tugas masyarakat selain ikut serta dalam pembangunan adalah mengawasi pengawas dan kinerja desa, untuk itu terus memperkuat Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dapat dilakukan dengan menempatkan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Penyelenggaraan organisasi kelembagaan masyarakat di desa harus didukung oleh kemampuan anggaran dan kebutuhan pembangunan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua LPMD, Ketua PKK, Kepala Adat dan Sekretaris Desa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. Jika Lembaga Desa ingin kuat dan mandiri, maka setiap program kerja yang akan dilakukan oleh Lembaga SDM Di Desa harus mengikuti prosedur, karena di dalam Lembaga SDM itu harus kuat dan berpotensi.

Kata Kunci: Penguatan Lembaga Desa.

ABSTRACT

STRENGTHENING VILLAGE INSTITUTIONS TOWARDS MANDIRI VILLAGES IN LIPATKAIN SELATAN VILLAGE, KAMPAR KIRI DISTRICT, KAMPAR REGENCY

BY:

BIMA ALPAJRI
NPM. 170411011

Village Government is the leading service unit for the community and is the main thing for the success of all programs. Therefore, strengthening the village is a necessity that cannot be postponed in an effort to realize community welfare as the goal of regional autonomy and village independence. The active involvement and seriousness of the local government is very much needed, both from the central government, local government, sub-district government, especially the role of the village government itself. While the task of the community, in addition to participating in development, is to watch village supervisors and performance, for this reason, continue to strengthen Community Institutions in the Village which can be carried out through placing Community Institutions in accordance with their functions. The implementation of community institutional organizations in the village must be supported by budgetary capabilities and the need for village development. This type of research is a qualitative descriptive study, the informants in this study were the Village Head, LPMD Chair, PKK Chair, Customary Head and Village Secretary. The data sources used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews (interviews) and documentation. If the Village Institution wants to be strong and independent, every work program that will be carried out by the Village Institution for HR must follow procedures, because within the HR Institution it must be strong and have potential.

Keywords: Strengthening Village Institutions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul "**PENGUATAN LEMBAGA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA LIPATKAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**" dapat Peneliti selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Salam dan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Pada kesempatan ini tak lupa pula Peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga studi saya lancar.
3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Staf Pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak **Junaidi** selaku Kepala Desa Lipatkain Selatan, beserta para pegawai kantor Desa Lipatkain Selatan.
7. Kedua orang tua Saya, Ayahanda **Ruslan Abd Gani** dan Ibunda **Arna Hasan.** Terimakasih telah membesarkan dan mendidik saya.
8. Abang saya **Donald Syahputra, SH,. Hengki Irawan, Yongki Irawan S.Pd,.** dan Adik Saya **Tiara Kasih**.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara angkatan 2017, sukses untuk kita semua.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Teluk Kuantan, 2022

Bima Alpajri
NIM. 170411011

DAFTAR ISI

JUDUL i
TANDA PERSETUJUAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
2.1 Teori Administrasi Negara 8
2.2 Teori MSDM 9
2.3 Pembangunan Desa 10
2.4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 21
2.5 Partisipasi Dalam Pembangunan Desa 22
2.6 Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 31
2.7 Kebijaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 33
2.8 Pemberdayaan Masyarakat Desa 34
2.9 Desa Mandiri 35
2.10 Hambatan Dalam Mewujudkan Desa Mandiri 45
2.11 Kerangka Berpikir 46
2.12 Depinisi Operasional 47
2.13 Operasionalisasi Variabel Penelitian 48
BAB III METODE PENELITIAN 50

3.1 Jenis Penelitian 50
3.2 Informen..... 50
3.3 Sumber Penelitian..... 51
3.4 Fokus Penelitian 51
3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 52
3.6 Metode Analisa Data 54
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian 56
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 57
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar 57
4.1.1 Keadaan Geografis..... 61
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kampar 63
4.1.3 Lambang Daerah Kabupaten Kampar..... 64
4.1.4 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kampar 66
4.2 Sejarah Kenegerian Lipatkain 67
4.2.1 Sejarah Kenegerian Lipatkain 65
4.2.2 Keadaan Geografis Kenegrian Lipatkain 68
4.2.3 Keadaan Iklim 69
4.2.4 Penduduk/Demografis Lipatkain Selatan..... 69
4.2.5 Kebudayaan Kenegrian Lipatkain 70
4.2.6 Pemerintah Desa 71
4.3 Pemerintah Desa..... 73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73
5.1 Identitas Responden..... 73
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 73
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia..... 74
5.1.3 Tingkat Pendidikan 74
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar 75
5.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Desa Lipatkain Selata.. 75
5.2.2 Pengelolaan Teknologi di Desa Lipatkain Selatan 79

5.2.3 Pengelolaan Akses Pasar di Desa Lipatkain Selatan 83
5.2.4 Pengelolaan Biaya di Desa Lipatkain Selatan 86
BAB VI PENUTUP 91
6.1 Kesimpulan 91
6.2 Saran 91
DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR TABEL

2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 48
3.1 Tabel Daftar Informan Penelitian 51
3.2 Tabel Kegiatan Penelitian 56
4.1 Tabel Kabupaten Kampar Dimekarkan Menjadi 21 Kecamatan 61
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 70
4.3 Daftar Kepala Desa..... 72
5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 74
5.2 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur 75
5.3 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan..... 75

DAFTAR GAMBAR

2.1 Siklus Desa Mandiri 41
2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 47
4.1 Peta Kabupaten Kampar 60
4.2 Lambang Daerah Kabupaten Kampar 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Wawancara 107
Lampiran II	Dokumentasi Penelitian di Desa Lipatkain Selatan.....109
Lampiran III	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 110
Lampiran IV	Surat Keterangan Penelitian.....111
Lampiran V	Catatan Bimbingan 112
Lampiran VI	Daftar Riwayat Hidup .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan public dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat. Perlunya melaksanakan pembangunan di desa untuk dapat memperlancar pemenuhan kebutuhan public dalam pelayanan. Pentingnya dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa maju dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang selama ini terkesan memprihatinkan. Kebijakan pemerintah tentang program pengembangan desa maju dan mandiri sangatlah baik dan mendapat dukungan.

Salah satu konsep membangun desa maju dan mandiri adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam Undang-Undang Desa ini, pemerintah ingin memberikan tempat yang memadai dan leluasa untuk desa dapat berkembang dengan sistem demokrasi agar desa dapat meningkatkan kesejahteraannya, agar terciptanya pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasankawasa lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Undang-Undang Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Desa di sini dijelaskan, “desa dan

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Undang-Undang Desa menyebut dengan jelas tentang pengertian desa, prinsip dan tujuan pembangunan desa yang mengedepankan posisi desa dengan kewenangannya berdasar hukum. Maka diperlukannya pembenahan dalam upaya peningkatan Desa karena hingga saat ini desa di pelosok masih ada desa-desa yang tertinggal.

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui pembangunan desa diharapkan masyarakat desa memiliki jaminan hidup yang sejahtera dalam pedesaan. Tidak hanya melalui pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tetapi melalui pemberdayaan masyarakat Desa juga yang artinya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Kabupaten Kampar sendiri salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau. Disamping julukan sebagai *Bumi Sarimadu,* Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km^2 atau 12,26% dari luas Propinsi Riau dan jumlah penduduknya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 berjumlah 790.313 jiwa yang terdiri dari 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 Desa sebagai hasil pemekaran dari 12 Kecamatan sebelumnya. (Wikipedia).

Seperti hal nya dengan Desa Tanah Merah kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar, meraih predikat desa Mandiri dari pemerintah daerah kabupaten Kampar. Dengan meraih desa Mandiri berarti desa Tanah Merah sudah selangkah lebih maju dari pada desa yang lainnya, yang ada di kabupaten Kampar dan juga Propinsi Riau. Meraih predikat desa Mandiri bukanlah hal yang mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya desa harus mengisi indeks desa membangun, langsung dilaporkan ke Kementerian Pedesaan Republik Indonesia. Dengan mengetahui Desa Tanah Merah telah mendapatkan predikat, peneliti tertarik untuk melihat atau ingin mengetahui apakah Desa Lipatkain Selatan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri bisa menjadi Desa yang mandiri (harianwarta1).

Sebelumnya penulis akan membahas terlebih dahulu, apa itu desamandiri?. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu:

1. kebutuhan dasar.
2. pelayanan dasar.

3. Lingkungan.

4. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi desa. Khususnya terhadap pembangunan desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintah desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakat.

Pembuatan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang mempunyai konsekuensi kepada daerah untuk menggali potensi, terutama fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang sebenarnya merupakan suatu cara untuk memeratakan hasil pembangunan dengan menonjolkan partisipasi seluruh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Melaksanakan mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan dinamika masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan desa, LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Keberhasilan Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Adapun masalah yang ada di desa tersebut adalah:

1. Kurangnya dukungan dari lembaga desa lainnya dan partisipasi masyarakat.
2. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Kurangnya kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis bisa mengidentifikasi masalah sebagai berikut: "Bagaimanakah penguatan Lembaga desa menuju desa mandiri di desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini diantaranya yaitu: "Untuk mengetahui Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri di Desa

Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar" khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

   Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan berkaitan dengan ilmu pemerintahan pada khususnya peran LPM dalam pembangunan.

2. Secara Praktis

   a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pengurus LPM Desa Lipatkain Selatan dalam menjalankan peran mereka.

   b. Memberikan masukan terhadap Lembaga atau instansi lain yang bergerak dalam usaha pembangunan di pedesaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to administear yang berarti mengelola (to manage) atau menggerakan (to direct). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat.

Pengertian administrasi menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya.

Sementara menurut Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011: 3) mengemukakan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa administrasi merupakan kegiatan/kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004: 3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.

Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

2.2 Teori MSDM

Menurut Simamora (dalam Sutrisno, 2009:3) manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Sementara itu Schuler, (dalam Sutrisno, 2009:6) mengartikan manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan - tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ardana, (2012:5) manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan penggerakan, pengorganisasian dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan.

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiikinya berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan.

Fokus manajemen sumber daya manusia ini terletak pada upaya mengelola sumber daya dalam semagat interaksi antara organisasi dan pekerja yang sering kali memiliki kepentingan yang berbeda.

Jadi manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.

2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dan masyarakat desa untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan semua aspek kehidupan desanya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi sebuah desa. Adapun untuk pembangunan desa meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan

Pembangunan adalah pergesaran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga.

Ini adalah persoalan yang menyangkut sampai berapa jauh informasi yang kita miliki mengenai pembangunan, apabila kita tidak mengerti arti inti dari pembangunan itu.

Menurut Todaro (1997:103) menyatakan bahwa: pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan atau kejahatan dunia sekarang. Kekurangan makanan yang sehat atau yang bergizi, penyakit, buta aksara, kemunduran-kemunduran, pengangguran dan ketimpangan atau ketidakadilan. Jika diukur dari tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pekerjaan, keadilan dan penghapusan kemiskinan, maka pembangunan itu mengalami kegagalan atau kalaupun sukses hanyalah sebagian kecil saja.

Tiap-tiap negara mengejar pembangunan adalah suatu tujuan bahwa semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang.

Karena itu, pembangunan seharusnya diselediki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan social. Sebagai tambahan, terhadap perbaikan-perbaikan dibidang penghasilan dan output, khususnya diadakan perombakan-perombakan yang radikal dalam lembaga-lembaga, struktur dan administrasi, begitupun dalam sikap-

sikap mental dan bahkan banyak pula yang harus merubah adat kebiasaan dan kepercayaan. Akhirnya walaupun pembangunan itu biasanya ditetapkan atau diarahkan dalam konteks nasional, realisasinya yang luas bias memaksa modefikasi fundamental ekonomi internasional, begitupun sistem sosialnya. Akan tetapi, sebelum mengadakan Analisa mengenai kompleksitas pembangunan, kita mulai dulu dengan membahas dua macam pendekatan konseptual yang penting mengenai studi atau telaah pembangunan ekonomi. Kemudian kita akan meninjau kembali dua pengertian yang penting, yaitu dualisme dan masyarakkat ganda.

Pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem social ekonomi, sikap masyarakat dan Lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan sehingga pembangunan adalah proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberika berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian (1994:105) memberikan pengertian pembangunan adalah " usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalm rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Todaro (1997:128) menyebutkan apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, tetapi pembangunan dalam semua masyarakat haruslah mempunyai paling sedikit tiga sasaran sebagai berikut:

a. Mempersiapkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bias hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata-mata, tetapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.

c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula organisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan sosial ekonomi, pertama-tama mengutamakan peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok. Disamping itu diutamakan pula adalah

untuk menghapus kemelaratan khususnya dalam hal kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dalam menanggulangi pengangguran dan mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Untuk itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down),* pendekatan dari bawah (*bottom up)* dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa. Pendekatan (*top down)* dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintah. Pendekatan (*bottom up)* dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

2. Perencanaan

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (Conyers , 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah "usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu". Sedangkan Nehru (Conyers, 1994:4) menyatakan bahwa perencanaan adalah "suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta serta situasi sbagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah".

Benhakker (Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa prencanaan adalah "seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan". Selain itu diungkapkan juga yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian secara tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatnkan sumber daya yang semaksimal mungkin guna mencapai tujuan- tujuan tertentu dimasa depan.

Menurut (Widjaja, 2003: 83) perencanaan pembangunan desa juga termuat dalam otonomi daerah yaitu:

a. Hakikat mendasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk memberdayakan

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman.

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah Kabupaten. Dengan demikian desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.

c. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

d. Keadaan dan masalah yang dihadapi antara lain: peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum lengkap, fasilitas pemerintah sering terlambat, kualitas eksekutif dan legislatif terbatas, daerah kekurangan

referensi, culture shock (daerah-isme), formulasi perimbangan keuangan antara dearah dengan desa tidak ada dan terjadi expenditure yang tidak rasional, inkonsistensi aturan dan kewenangan, kualitas SDM penyelenggara pemerintah desa dan kuantitas sarana serta prasarana kerja terbatas.

Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajemen dalam buku yang ditulis oleh G.R. Terry (Malayu, 1998: 92) mengatakan perencanaan adalah "memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mnggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan".

Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Scaffer (Conyers, 1999: 4) mengemukakan bahwa "apapun yang terlintas dibenak kita manakala kita membicarakan perencanaan kiranya tidak terlepas dari kaitan persoalan pengambilan keputusan". Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam `perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan) dan waktu (kapan, bagaimana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan O'Donnel (Malayu, 1993: 92), perencanaan adalah "fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada". Sedangkan Louis A. Allen (Malayu,1993:92) mengemukakan bahwa perencanaan adalah "menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan".

3.Perencanaan Desa

Perencanaan desa adalah perumusan tujuan, kebijakan, dan pelayanan desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Pelayanan Desa terdiri dari struktur organisasi dan tugas pemerintah desa. Pelayan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Sekretaris desa adalah salah satu perangkat desa yang bertugas mengurus administrasi didesa. Misalnya, membuat surat kelahiran atau surat keterangan. Pelayanan desa bertujuan untuk menyelenggarakan subsistem pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

desa. Desa dapat juga melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Sehingga didesa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan desa. LPMD merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. LPMD mempunyai program untuk memaksimalkan perencanaan pelayanan desa. Bentuk perencanaan pelayanan desa antara lain:

1. Merencanakan kegiatan pemerintah kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Menurut R.H UnangSoenardjo (HanifNurcholis,2011:4)menyebutkan bahwa:

> Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki sususan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak enyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut I Nyoman Beratha (Hanif Nurcholis, 2011: 4) memaparkan bahwa:

> Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupkan kesatuan masyarakat hukum berasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan polotik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannnya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dipemerintahan kabupaten/ kota.

Pelaksanaan perencanaan pelayanan desa dilakukan oleh kepala desa sekretaris desa, BPD dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tugas pemerintah desa akan tercapai apabila saling dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat desa.

2.4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas:

1. Penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif.
2. Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif.
3. Pemberdayaan masyarakat dan penumbuhkembangan dinamika masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Hasil yang dicapai perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat

dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

2.5 Partisipasi Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi pembangunan desa merupakan pelaksanaan sistem pemerintah desa yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan suatu desa. Adapun partisipasi pembangunan desa meliputi aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa perlu diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah sangat penting bagi kemajuan suatu desa. Partisipasi berasal dari bahasa inggris *participation* yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan partisipasi berarti berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah peranserta anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa pendidikan melalui pelatihan, partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat.

Menurut Juliantara (2004: 85) substansi dari partisipasi adalah "bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat", sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

> *Pertama*, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat memudahkan situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. *Kedua*, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan

masyarakat. *Ketiga*, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat (Juliantara, 2002: 89-90).

Menurut Juliantara (2002: 90-91) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *akses* dan *control*. Pengertian dari masing- masing sekuen tersebut adalah :

a. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

b. *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.

c. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Menurut Mikkelsen (2003: 64) menyatakan bahwa parisipasi adalah "suatu proses yang aktif, yang mengandung ati bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu". Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mubyarto (1988: 37),

“partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Sedangkan dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Berdasarkan pandangan diatas menunjukan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang dilaksanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para stakeholders pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupankan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dengan realita bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting yaitu dengan keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kemudian keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk didalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain, serta keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Keadaan diatas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam proses tahapan selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, Siagian (1994:100) menyatakan bahwa “karena kedinamisan individu-individu didalam masyarakat maka semakin lama semakin rumit pula kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan”. Dipuaskan berarti sesuatu yang ingin dicapai dalam sutu kegiatan pembangunan. Ini berarti parisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (*stakeholder*), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakannya untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan hal diatas, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu partsipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam perencanaan merupakan program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama akan tetapi ada kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan

menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan, namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bagian dari program penilaian kebutuhan dan perencanaan program yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi cenderungan menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan diatas menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa, hal ini sesuai dengan pendapat yang melengkapi pandangan dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnyadalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsesus dalam kebijakan pembangunan dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul dimasyarakat.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sekilas pemberdayaan memiliki beberapa makna salah satunya adalah menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Orang- orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan. Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan

hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi "terbelenggu" dalam berinovasi.

2.6 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian huungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/ kota.

Menurut Widjaja (2003: 84) menyebutka bahwa:

> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur mengenai Desa (Bab IX, Desa) pada pasal 93 sampai dengan pasal 111, merupakan masa transisi dan memberikan landasan yang kuat menuju development

community, dimana desa tidak lagi merupakan level administrasi terendah, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi lebih merupakan independent community.

Dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Menurut Widjaja (2003: 85) menjelaskan bahwa "dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintah desa yang kuat dan mandiri". Selanjutnya Widjaja (2003: 85) menyebutkan bahwa kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa.
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintah desa dan paguyuban pemerintah desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa.
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas).
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
9. Penigkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

2.7 Kebijaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Widjaja (2003: 86) menyebutkan bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa adalah:

1. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintah desa, lembaga adat desa dan lembaga lainnya.
2. Menigkatkan pola pengembangan desa , tingkat perkembangan desa dan pemebentukan desa baru.
3. Meningkatkan pola penataan kewenangan desa dan pembagian wilayah desa, pusat pertumbuhan desa dan wilayah berkemban, pendataan penduduk dan monografi.
4. Mengembangkan peranan lembaga adat mengembangkan hak-hak wilayah.
5. Menguatkan dan meningkatkan kerja sama antar desa.
6. Meningkatkan kapasitas kemampuan aparatur pemerintahan desa, dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
7. Perumusan kebijakan pemberian tunjangan pendapatan dan tabungan asuransi bagi aparatur pemerintahan desa.

8. Perumusan kebijakan fasilitas pengelolaan Badan Perwakilan Desa serta pengelolaan sekretaria Badan Perwakilan Desa.
9. Perumusan kebijakan fasilitas pengelolaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
10. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan untuk kepentingan desa dalam menggali potensi kekayaan desa.
11. Meningkatkan pemanfaatan dana pinjaman dan sumbangan pihak ketiga bagi kepentingan desa.

2.8 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Widjaja (2003:169), pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus di ikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya.

2. Akses terhadap teknologi.
3. Akses terhadap pasar.
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat didesa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu 'koperasi'.

2.9 Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa mandiri adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. (Jurnal Agunggunanto, vol. 13 No. 1 Maret 2016) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Didalam Permendes PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015) dalam Bab III Pasal 7 dan Pasal 9 juga dijelaskan bahwasanya desa maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa.

Kemudian juga dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapasitas desa secara berkelanjutan. Adapun tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri yaitu pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri (Menteri PPN/Bappenas dan BPS, Indeks Pembangunan Desa 2014: 3) yaitu:

1. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa.

3. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

4. Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

Mengembangkan desa menjadi desa mandiri memang tidaklah mudah, ada beberapa perangkat utama yang perlu dikembangkan dalam mendukung keberhasilan proses tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi aktif dari warga/masyarakat yang menjadi modal sosial (social capital). Partisipasi masyarakat dalam proses menuju desa mandiri, berarti mengubah paradigma pembangunan desa yang selama ini memposisikan masyarakat selaku objek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut. Partisipasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap tujuan yang hendak dicapai, sehingga memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan. Dalam tataran lebih jauh, partisipasi merupakan langkah awal guna mengubah budaya yang selama ini menjadi bagian dari akar persoalan ketertinggalan desa. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung merupakan refleksi tingkat kepercayaan dalam masyarakat. Karena tingkat kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong proses kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah akan mengalami kelambanan dalam mencapai tingkat kemajuan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

2. Kepemimpinan dan inovasi perangkat desa yakni Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat didalamnya. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara maksimal, tidak hanya dalam tatanan kepatuhan, namun lebih dari itu menimbulkan kesadaran warga terhadap proses menuju desa mandiri. Disamping itu, tentunya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Inovasi diperlukan guna menciptakan program maupun mengembangkan program yang telah terlaksana. Mengingat belum semua masyarakat desa menciptakan inovasi, dibutuhkan perangkat desa sebagai pemicu sekaligus motor inovasi tersebut. Tidak kalah penting peran perangkat desa sebagai mediator dalam mencari sumber-sumber pendanaan pengembangan desa mandiri. Wadah seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa hingga tingkat kabupaten, menjadi wadah yang efektif bagi upaya mensukseskan program pengembangan desa mandiri, jika berhasil dikawal oleh perangkat desa hingga terlaksana. Sebab, bagaimana pun pendanaan merupakan unsur penting yang salah satunya bisa didapatkan dari APBD.

3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan pendukung sesuai dengan dimensi kemandirian yang hendak dicapai, seperti koperasi, kelompok tani, lumbung desa, forum kesehatan, kader sehat desa, dan kelompok sadar wisata.

Dalam konteks desa mandiri ekonomi, misalnya koperasi mampu berperan sebagai penyedia modal, penyedia sarana dan prasarana pendukung usaha warga. (Abdulrahman, 2008).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, upaya dalam mewujudkan desa mandiri dapat dijalankan ataupun dilaksanakan dengan beberapa komponen dalam indeks desa membangun yaitu:

1. Ketahanan Sosial yaitu kemampuan untuk membuat kehidupan yang nyaman dan aman bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun ketahanan sosial tersebut dapat dengan memaksimalkan seperti:

    - Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit, tersedia tenaga kesehatan seperti bidan, dokter dan tenaga kesehatan lain, tingkat aktivitas posyandu, serta jaminan kesehatan seperti tingkat kepesertaan BPJS.

    - Akses Pendidikan yang terdiri dari akses ke pendidikan SD/MI kurang dari 3 kilometer, akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer, akses ke SMA/SMK kurang dari 6 kilometer, akses ke pengetahuan seperti taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.

    - Modal Sosial yang terdiri dari memiliki kebiasaan bergotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, terdapat

kegiatan kelompok olahraga, memiliki toleransi yang baik antar warga, serta partisipasi masyarakat mengadakan siskamling untuk rasa aman penduduk.

- Lembaga Kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa yang terdiri dari karang taruna, tim penggerak PKK, RT/RW, Posyandu, LPM, dan sebagainya.
- Partisipasi masyarakat yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes; memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan dengan ikut dalam pengawasan melaksanakan pembangunan desa, mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian daari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut.

2. Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari keragaman produksi masyarakat desa, kemudian menyediakan pusat pelayanan perdagangan seperti pasar rakyat, menyediakan lembaga ekonomi seperti BUMDes dari desa serta koperasi, kualitas jalan desa seperti jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan.
3. Ketahanan Ekologi yang terdiri dari memperbaki kualiatas lingkungan jika ada pencemaran air, tanah, sungai yang terkena limbah; potensi rawan becana alam seperti banjir.

Menurut Lendy W. Wibowo Desa Mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau karya desa yang

membanggakan dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, desa mandiri bertumpu pada trisakti desa yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti Desa dapat dicapai maka desa itu disebut sebagai desa berdikari. Karsa, karya, sembada desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa.

Gambar 2.1 Siklus Desa Mandiri

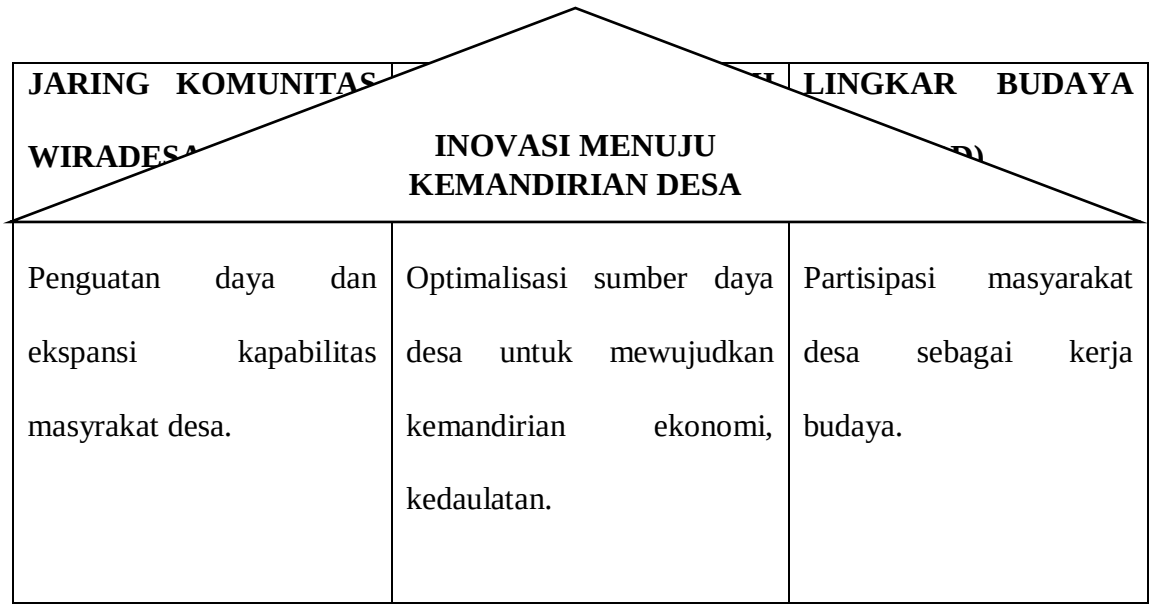

TUJUAN

Tiga daya tersebut bahwa membangun Desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Konsep tersebut dikenal dengan istilah "Lumbung Ekonomi Desa, Lingkar Budaya Desa, dan Jaring Wira Desa".

Lumbung Ekonomi Desa tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tetapi juga mendorong usaha ekonomi desa dalam arti luas. Penciptaan kegiatan-kegiatan yang membuka akses produksi, distribusi, dan pasar bagi rakyat desa dalam pengelolaan kolektif dan individu mesti berkembang dan berlanjut.

Pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang dari bawah karena dukungan ekonomi rakyat di desa.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah bertumpu pada 2 hal pokok yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai.

Karena pasar tidak bisa membentuk bahkan menstimulasi kesempatan dan pelaku dalam keadaan ketidakseimbangan modal, informasi, dan akses lain yang dimiliki para pelaku, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk fasilitasi dan regulasi. Kurang adanya intervensi yang pantas dari pemerintah dalam daya ekonomi bawah ini telah menyebabkan permasalahan antara lain kegagalan pasar, terjadinya monopoli, misalokasi sumberdaya, dan adanya sumberdaya yang tidak terpakai.

Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya tidak cukup hanya melalui treatment membuka akses permodalan, akan tetapi juga akses produksi, akses distribusi dan akses pasar. Akses permodalan dibuka dan dikembangkan melalui pemberian kredit yang terjangkau dan fleksible, akses produksi dikembangkan melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal yang berbasis sumberdaya lokal, dan akses pasar dikembangkan melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan terbentuk dan berkembangnya kondisi yang optimum dari perekonomian di perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi bertumpu pada sumberdaya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajian, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan sehat, adalah sektor ekonomi strategis yang harusnya digarap Desa dan Kerjasama Desa.

Lumbung Ekonomi Desa juga harus mengembangkan sektor usaha dan produksi rakyat yang mendeskripsikan kepemilikan kolektif lebih konkrit. Bentuk-bentuk yang telah dinaungi peraturan perundangan semacam BKAD, BUMDes, Koperasi, maupun badan usaha milik masyarakat lain perlu diprioritaskan. Pilihan-pilihan usaha berbasis kegiatan yang telah dibentuk dan dikembangkan masyarakat Desa misalnya listrik desa, desa mandiri energi, pasar desa, air bersih, usaha bersama melalui UEP, lembaga simpan pinjam juga merupakan prioritas kegiatan dalam rangka pengembangan Lumbung Ekonomi Desa.

Jaring Wira Desa adalah upaya menumbuhkan kapasitas manusia desa yang mencerminkan sosok manusia desa yang cerdas, berkarakter dan mandiri. Jaring wira desa menempatkan manusia sebagai aktor utama sekaligus mampu menggerakkan dinamika sosial ekonomi serta kebudayaan di desa dengan kesadaran, pengetahuan serta ketrampilan sehingga desa juga melestarikan keteladanan sebagai soko guru kearifan lokal.

Lingkar Budaya Desa mengangkat kembali nilai-nilai kolektif desa dan budaya bangsa mengenai musyawarah mufakat dan gotong royong serta nilai-nilai manusia desa Indonesia yang tekun, bekerja keras, sederhana, serta punya daya tahan. Selain itu lingkar budaya desa bertumpu pada bentuk dan pola komunalisme, kearifan lokal, keswadayaan sosial, teknologi tepat guna, kelestarian lingkungan, serta ketahanan dan kedaulatan lokal, hal ini mencerminkan kolektivitas masyarakat di desa. (Lendy W. Wibowo, Pejaten 23 November 2015).

2.10 Hambatan Dalam Mewujudkan Desa Mandiri

1. Sumber daya manusia

   Sumber daya manusia daerah perdesaan ditandai oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterampilan yang rendah. Penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik banyak bermigrasi ke daerah lainnya, terutama kedaerah perkotaan/industri sehingga memperburuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tinggal di wilayah perdesaan. Salah satu akibat dari lemahnya sumber daya manusia perdesaan ini adalah rendahnya budaya kewirausahaan dan rendahnya jumlah sumber daya yang dimiliki masyarakat perdesaan sehingga pada gilirannya mengakibatkan kapasitas inovasi dan pembelajaran masyarakat juga rendah. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

2. Sumber Daya Modal (investasi)

   Investasi di indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempenaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Teknologi yang masih rendah

   Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang digunakan makaa makin besar kemampuan untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan suatu perekonomian adalah dengan pemakaian teknologi yang modern. (Arsyad, 2011: 9-11)

2.11 Kerangka Berfikir

Desa Lipatkain Selatan merupakan salah satu desa dikecamatan Kampar Kiri yang maju dalam bidang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa. Pengaruh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi sangat membantu didalam aspek kehidupan, sehingga mempengaruhi partisipasi untuk terjun secara langsung kepada pemerintah desa yang hanya melaksanakan tugas pokok dari pemerintah pusat. Untuk menunjang pembangunan desa maka masyarakat juga ikut ambil bagian didalam pelaksanaan dan penilaian hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah desa.

Gambar 2.2 kerangka Berfikir Penelitian.

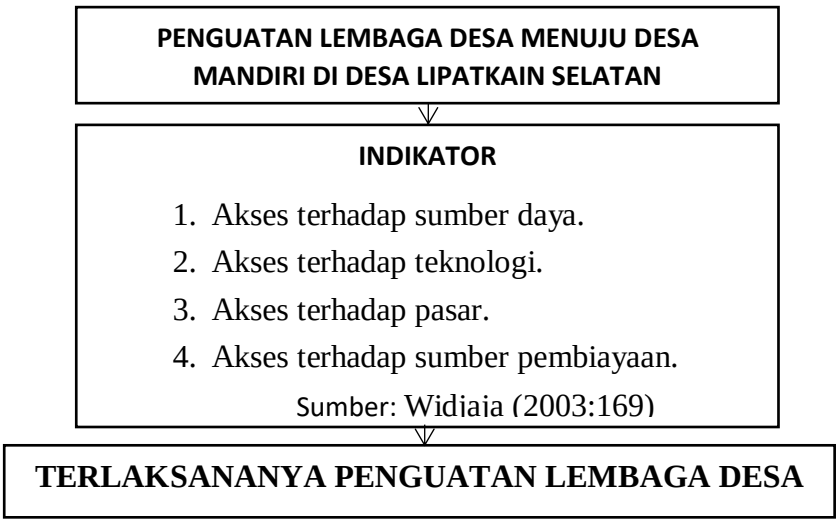

2.12 Definisi operasional

Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti. Ada berbagai macam cara untuk meneliti sesuatu

yang konseptual, sehingga definisi operasional variabel harus di bedakan dari definisi konseptual. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Negara adalah merupakan kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan.
2. MSDM adalah merupakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.
3. Pemerintah Desa adalah pemerintahan desa dan pemerintah desa, pemerintahan desa yaiu penyelenggaraan pemerintahan desa an badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Penguatan Lembaga adalah peranan kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa merupakan domain terpenting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

2.13 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar	1. Akses Sumber Daya	a. Manusia b. Alam	Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	2. Akses Teknologi	a. Internet b. Komputer c. Handphone	Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	3. Akses Pasar	a. Produk	Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	4. Akses Biaya	a. APBN b. APBD	Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Sumber: Widjaja (2003:169)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memposisikan manusia sebagai alat

penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

3.2 Informan

Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis menyiapkan pedoman yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahn ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	**Informan**	**Jumlah**	**Persen**
1	Kepala Desa	1 orang	25%
2	Ketua LPM	1 orang	25%
3	PKK	1 orang	25%
4	Lembaga Adat	1 orang	25%
	Jumlah	**4 orang**	**100%**

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

3.3 Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus LPMD, Pengurus Desa dan warga masyarakat Desa Lipatkain Selatan kecamatan Kampar Kiri. Untuk mendukung keabsahan data peneliti melakukan triangulasi data. Sedangkan objek penelitiannya adalah Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Lipatkain Selatan Mandiri.

3.4 Fokus Penelitian

Setting penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian. Adapun dalam penelitian ini setting penelitian berlangsung di desa Lipatkain Selatan kecamatan Kampar Kiri.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan wawancara, angket, observasi, dokumentasi, dan triangulasi (Sugiyono:193-330).

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012: 72).

Teknik wawancara diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Hal ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam. Informasi akan diperoleh terutama dari

mereka yang tergolong sebagai sumber informasi yang tepat dan sebagai kunci. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

Dalam wawancara peneliti menggali sebanyak mungkin data yang terkait dengan masalah partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Karangwuni kecamatan Rongkop. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Pengurus LPMD, Pengurus Desa dan masyarakat. Dalam wawancara peralatan yang dibutuhkan yaitu : naskah kuesioner atau daftar pertanyaan, alat perekam (voice recorder), kamera dan alat tulis.

2. Observasi

Menurut Nasution (Sugiyono, 2012: 64), observasi adalah "dasar semua ilmu pengetahuan". Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan terperinci. Data informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam tulisan.

Dalam penelitian ini peneliti berperan serta aktif melihat langsung proses pembangunan terkait peran partisipasi Lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri yang meliputi lokasi penelitian, keadaaan lingkungan penelitian, proses perencanaan, proses partisipasi dan faktor- faktor pendukung partisipasi Lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono(2012: 82)menyebutkan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bias berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Seperti biografi, foto, gambar, film, dan lain-lain. Dokumentasi digunakan untuk menggali informasi dalam kaitannya dengan arsip atau catatan yang ada, proses perencanaan pembangunan, foto-foto kegiatan, fasilitas, dan sarana serta catatan kejadian yang dapat membantu menjelaskan kondisi yang akan digambarkan oleh peneliti. Penggunaan dokumen ini mengumpulkan data-data yang dapat mendukung dan menambah data dan informasi bagi teknik pengumpulan data yang lain.

3.6 Metode Analisis Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis. Analisis data kualitatif menurut Bog dan Bikken (Moleong, 2011:248) adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain”.

Dalam model kegiatan ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian memilah-milahnya kedalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman.

Secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Lipatkain Selatan Mandiri dalam perencanaan pembangunan di Desa Lipatkain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap verifikasi data/ penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang menghasilkan simpulan yang dapat dipercaya.

Analisis data dilakukan dalam proses observasi dan wawancara deskriptif, selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut, dengan menggabungkan elemen-elemen yang sama. Analisis ini dilakukan bersamaan dengan pengamatan terfokus dan wawancara struktural. Dalam tahap ini terkait dengan fokus penelitian yaitu Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Lipatkain Selatan Mandiri dalam perencanaan pembangunan desa Lipatkain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.

Maka selanjutnya dilakukan analisis dengan cara pengorganisasian hasil temuan data dari pengamatan dan wawancara yang diperoleh secara terseleksi dilanjutkan dengan analisis tema untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dan menampilkan makna dari yang menjadi fokus penelitian. Dari hasil studi tersebut dilakukan pembahasan dari analisis serta evaluasi sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan analisis rekomendasi. Kemudian dari analisis rekomendasi ini diajukan beberapa rekomendasi yang dipandang penting dan bermanfaat.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Tabel 3.2 Tabel Kegiatan Penelitian

N	Nama Kegiatan	Bulan															
		Januari				Juli				November				Desember			
1	Pengajuan Judul Proposal																
2	Persiapan Penyusunan Proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Perbaikan Dan Revisi Proposal																

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah DatukWan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati,. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun factor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain:

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah - tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kampar.
5. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.

7. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati Wilayah I dan II berada langsung di bawah coordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor: 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor: 6 Tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 105 Tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 Tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 Tanggal 24 Desember 1999, maka

terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan jadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

4.1 Peta Kabupaten Kampar

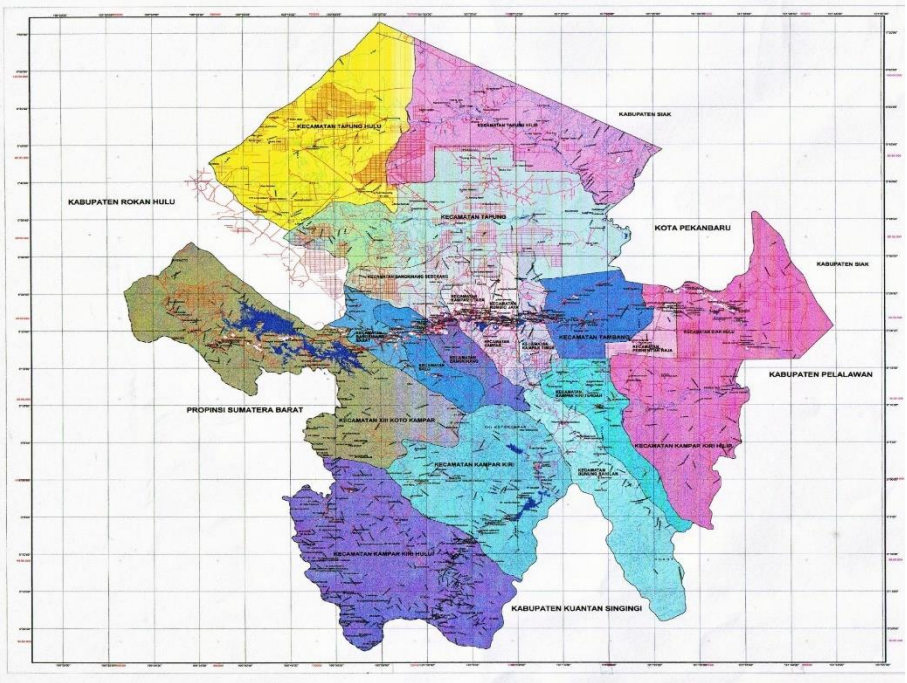

Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten Kampar, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 Kecamatan. Seiring perjalan waktu, pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Tabel 4.1 Tabel Kabupaten Kampar Dimekarkan Menjadi 21 Kecamatan.

No	Kecamatan/daerah
1	Kecamatan Bangkinang
2	Kecamatan Bangkinang Kota

3	Kecamatan Gunung Sahilan
4	Kecamatan XIII Koto Kampar
5	Kecamatan Kampa
6	Kecamatan Kampar
7	Kecamatan Kampar Kiri
8	Kecamatan Kampar Kiri Hulu
9	Kecamatan Kampar Kiri Tengah
10	Kecamatan Kampar Kiri Hilir
11	Kecamatan Kampar Utara
12	Kecamatan Koto Kampar Hulu
13	Kecamatan Kuok
14	Kecamatan Perhentian Raja
15	Kecamatan Rumbio Jaya
16	Kecamatan Salo
17	Kecamatan Siak Hulu
18	Kecamatan Tambang
19	Kecamatan Tapung
20	Kecamatan Tapung Hulu
21	Kecamatan Tapung Hilir

Sumber: Kominfo Kabupaten Kampar

4.2 Lambang Daerah Kabupaten Kampar

Gambar IV.2. Lambang Daerah Kabupaten Kampar

1. Bentuk dan Pembagian Lambang

Lambang Kampar terbagi atas 9 bagian, yaitu:

a. Empat petak dalam perisai.

b. Tiga garis putih di tengah.

c. Bintang lima dengan dua tangkai padi

d. Rusa.

e. Menara sumur.

f. Dua buah gerobak lori.

g. Empat puncak banteng.

h. Pohon karet.

i. Peta Kabupaten Kampar.

2. Arti Lambang

a. BENTENG dan PERISAI adalah melambangkan kekuatan dan kekebalan rakyat dalam berjuang dan membangun.

b. BATU BERSUSUN adalah melambangkan persatuan Nasional yang kuat, kokoh, serta menimbulkan inspirasi membangun.

c. TUJUH BELAS BUAH BATU BERSUSUN adalah menunjukan tanggal tujuh belas hari proklamasi.

d. DELAPAN BUAH BATU BATA adalah menunjukan bulan delapan (bulan Agustus).

e. EMPAT dan LIMA buah dibawah menunjukan tahun 45 (1945)

f. SATU PINTU GERBANG adalah melambangkan pintu kemakmuran.

g. BINTANG BERSUDUT LIMA adalah melambangkan Pancasila.

h. POHON KARET adalah melambangkan sumber dari kemakmuran rakyat.

i. TUJUH BELAS BUTIR PADI dalam setangkai dan LIMA CABANG POHON KARET adalah melambangkan bahwa negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila.

j. EMPAT BUAH PUNCAK BENTENG adalah melambangkan adat istiadat yang menjiwai prikehidupan rakyat.

k. RUSA adalah melambangkan sifat-sifat ketangkasan, kecakapan, kelivahan dan keuletan.

l. PETA KABUPATEN KAMPAR menyatakan daerah Kabupaten Kampar.

m. MENARA MINYAK dan TANGKI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan gas bumi.

n. SATU LORENS dengan DUA GEROBAK LORI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan bahan-bahan logam.

4.2 Latar Belakang Kenegrian Lipatkain

Adalah salah satu dari enam Negeri tua di wilayah Rantau Kampar Kiri Kabupaten Kampar, daerah ini sudah berdiri semenjak kerajaan Gunung Sahilan berkuasa di Rantau Kampar Kiri dari abad ke 16 sampai denga runtuhnya pada tahun 1946. Setelah Indonesia merdeka Kenegerian Lipatkain merupakan ibu kota dari kewedanaan Kampar Kiri, pada tahun 1981 Kenegerian Lipatkain berubah status menjadi Desa Lipatkain dan menjadi ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Satu tahun kemudian tahun 1982 Desa Lipatkain berupa status menjadi Kelurahan Lipatkain. (Marlaili Rahim : 1985). Pada tahun 1999 kecamatan Kampar Kiri dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan kecamatan Kampar Kiri Hilir. Kemudian pada

tahun 2004 Kecamatan Kampar Kiri sebagai Kecamatan Induk Kembali dimekarkan menjadi tiga kecamatan lagi yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunun Sahilan, dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Bersamaan dengan pemekaran Kecamatan ini, Kelurahan Lipatkan juga dimekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Lipatkain Utara, Desa Lipatkain Selatan, Kelurahan Lipatkain, Desa Sungai Paku, dan Desa Sungai Geringing. (Kampar Kiri Dalam Angka 2010). Kenegerian Lipatkain merupakan suatu komunitas Hukum adat yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar . Pada wilayah hukum adat Kenegerian Lipatkain hari ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari lima desa yaitu :

1. Desa Lipatkain Selatan.
2. Desa Lipatkain Utara.
3. Kelurahan Lipatkain.
4. Desa Sungai Paku.
5. Desa Sungai Geringging.

4.2.1 Sejarah Kenegrian Lipatkain

Dalam tombo adat Kenegerian Lipatkain yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi disebutkan bahwa, pada zaman dahulu kala datanglah dua orang datuk kedaerah Lipatkain secara bersamaan yaitu datuk pertama bernama Datuk Sutan Lawik Api beliau, datang dengan perahu dari selat Malaka mudik ke Sungai Ombun (Batang Kampar Kiri) dan singgah (maontak Gala, membuang sauh)

di daerah yang sekarang Lipatkain. Ditepi sungai tersebut Datuk Sutan Lawik ApiManundo Kapae Sosak, Malambe (menebas) Kalimunting membuat ladang dan kebun. Tidak jauh disebelah hulu sungai datang pula seorang Datuk dari hulu sungai Kampar Kiri yaitu dari daerah Gunung Merapi (Pagaruyung) yaitu Datuk Godang menghilir dari hulu dan singgah membuat ladang dan kebun pula.

Kemudian disaat kedua Datuk tadi berburu binatang, dan menggumpulkan makanan dihutan(foodghatering). Maka berjumpalah mereka berdua, maka terjadilah dialok diantara keduanya tentang siapa yang dahulu datang di daerah Lipatkain ini. Masing-masing datuk mengakui dirinya yang dahulu datang dan berhak atas daerah Lipatkain dengan menunjukkan tanda-tanda masing-masing.

Setelah menunjukkan bukti masing-masing ternyata kedua datuk memang datang bersamaan, sehingga mereka bersepakat untuk tinggal bersama-masa membangun kampuong, dan ladang serta membuat janji persaudaraan layak nya adik dan kakak. Disaat kedua datuk sedang berburu di atas sebuah bukit, mereka melihat asap api yang sangat besar di daerah aliran sungai Singingi. Maka kedua Datuk kedaerah berangkat menyelusuri sungai Singingi melihat apa gerangan yang terjadi. Didaerah Singingi kedua datuk menemui kampuong yang tengah terbakar dan mayat-mayat yang berserakan, rupanya daerah Singingi diala (diserang Garuda), maka terjadilah pertempuran antara Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang dengan Garuda, sehingga Sang Garuda dapat dibunuh. Setelah Garuda dapat dibunuh, datuk-datuk tersebut mendengar tangisan anak kecil diantara reruntuhan rumah yang hancur diamuk Garuda.Direruntuhan rumah tersebut Sang Datuk menemukan seorang gadis kecil yang selamat.Maka gadis kecil tersbut di

bawah ke Kampuong Lipatkain dan dibesarkan oleh kedua orang datuk tersebut. Setelah berlalunya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun berganti. Maka gadis kecil yang bernama "Puti Majo" beranjak remaja dan dewasa maka tampaklah kecantikan dan rupawan nya sang Putri. Melihat paras yang rupawan maka jatuh hatilah kedua datuk pada Puti Majo, maka jadilah perselisihan tentang siapa yang berhak untuk mengawini Sang Putri.

Puncak dari persingan antara kedua Datuk, maka terjadilah pertarungan antara keduanya, setelah sekian lama bertarung, saling adu kesaktian, rupanya kedua datuk sama-sama pendekar dan tidak ada yang menang dan kalah.Setelah lelah bertarung maka dibuatlah kesepakatan untuk bersama-sama meninggalkan Kampuong dan meninggalkan Puti Majo sendirian.Datuk Godang lari keseberang Kampuong dan menetap disana, sedangkan Datuk Sutan Lawik Api lari ke hulu Batang Olang dan menetap pula disana. Tidak lama berselang maka datanglah Datuk Sinaro kedaerah Lipatkain dari pesukuan Mandailing/Maliling, di daerah Lipatkain tersebut.

Datuk Sinaro menemui seorang gadis menagis sendirian. Gadis tersebut adalah Puti Majo, Puti Majo menceritakan kisah tentang kedua Kakak angkat nya yaitu Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang yang berselisih dan meningalkan Kampuong karena memperebutkan dirinya. Dan meminta Datuk Sinaro untuk menjemput keduanya kembali ke Kampuong. Maka Datuk Sinaro berhasil membujuk kedua datuk untuk kembali kekampuong Lipatkain dan memperdamaikan keduanya. Maka dibutlah kesepakatan bahwa Datuk Sutan Lawik Api, Datuk Godang dan Puti Majo adalah bersaudara dan tidak boleh saling

menikahi hal ini juga berlaku bagi anak keturunan mereka hingga hari ini(Cilampuong pata baindiak sutonyo batali juo). Maka Puti Majo dinikahi oleh Datuk Sinaro maka Datuk Sinaro menjadi simondo dari Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang.

Maka dibagilah kekuasaan diantara datuk-datuk tersebut dimana Datuk Sutan Lawik Api adalah Pemilik Rantau, Datuk Godang Pemilik tanah Ulayat dan Puti Majo Pemilik Negeri, sehingga ketiga datuk adalah penguasa dinegeri Lipatkain dengan sebutan (Datuk Batigo). Sedangkan Datuk Sinaro adalah Suluh Negeri (Andiko Besar). Maka dibuatlah sebuah Negeri dengan nama Negeri Bungo Setangkai, inilah nama awal dari negeri Lipatkain. Kemudian datanglah beberapa suku lagi kenegeri Bungo Setangkai yaitu suku Melayu Palokoto, Suku Melayu Bendang, suku Nelayu nan ompek, suku Domo, sehingga negeri Bungo Setangkai didiami oleh delapan suku sehingga berdirinya kerajaan Gunung Sailan. Pada masa kerajaan Gunung Sahilan terjadilah perkara yang tak selesai-selesai di negeri Bungo Setangkai dimana negeri terbelah menjadi dua praksi besar delapan suku terpecah menjadi dua golongan yang masing masing kokoh pada pendiriannya.Sehingga setiap persoalan tidak bisa diambil kata sepakat. Persoalan ini sampai kepada Raja Gunung Sailan, maka raja mengambil keputusan untuk menempatkan keturunannnya dari suku Piliang untuk menetap di Lipatkain sebagai penengah dari delapan suku yang berselisih.Sehingga negeri Lipatkain terdiri dari sembilan suku.

4.2.2 Keadaan Geografis Kenegrian Lipatkain

Secara geografis Kenegerian Lipatkain terletak di sebelah selatan Kabupaten Kampar dengan ketinggian 40 Meter dari permukaan Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebun Durian dan Desa Subarak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Paman Timur dan desa Tanjung Pauh
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Salo Kecamatan bangkinang Barat
- SebelahBarat dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan

Kenegerian Lipatkan pada hari ini terdiri atas lima desa/kelurahan dengan luas wilayah 250,2 M2. Iklim kenegerian Lipatkain adalah beriklim tropis terletak pada garis Khatulistiwa, dimana tugu khatulistiwa terdapat di desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri. Sedangkan jumlah penduduk di Kenegerian Lipatkain adalah 9.793 Jiwa.

4.2.3 Keadaan Iklim

Adapun keadaan Iklim di kenegerian Lipatkain adalah beriklim tropis terletak pada garis Khatulistiwa, dimana tugu khatulistiwa terdapat di desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri, dan tidak panas pula terus-menurus. Dalam hal kesadaran penduduk terhadap lingkungannya, masih terdapat juga sebahagian masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, yang menghambat lancarnya aliran sungai di daerah ini. Jika dalam segi penebangan

hutan, tidak terlihat adanya illegal loging, kecuali dalam menebang pohon yang ada dalam wilayah tanah/ perkebunan mereka sendiri untuk diolah menajdi kayu bakar.

4.2.4 Penduduk/demografis Lipatkain Selatan

Desa ini terdiri dari 5 dusun: dusun Bukit Balam, dusun Khatulistiwa, dusun Muara setingkai, dusun Napan, dan dusun Koto Tuo. Luas Desa Lipatkain Selatan ini sekitar 51.900 Ha. Desa ini memimiliki jumlah penduduk 3106 jiwa, dengan laki laki 1965 jiwa, dan perempuan 1741 jiwa, dengan jumlah KK 1016.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**	**Persentase**
1	Laki-laki	1965	63%
2	Perempuan	1741	37%
	Jumlah	**3106**	**100%**

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Lipatkain Selatan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Lipatkain Selatan berjenis kelamin perempuan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin Laki-laki, dimana jumlah Perempuan hanya 1.741 orang atau 37%, sedangkan jumlah Laki-laki sebanyak 1.965 orang atau 63%.

4.2.5 Kebudayaan Kenegrian Lipatkain

Masyarakat Adat kenegerian Lipatkain secara kebudayaaan menganut kebudayaan matrilineal yaitu garis kekerabatan ditarik dari pihak ibu, Kebudayan ini dikenal dengan budaya Minangkabau. Sedangkan sistem perkawinannya adalah sistem matrilokal dimana seseorang harus mencari pasangan diluar suku atau klannya. Secara adat-istiadat penduduk kenegerian Lipatkain terdiri dari Sembilan suku/pesukuan yaitu terdiri dari :

1. Suku Patopang Basa dengan kepala suku Dt. Jalelo.
2. Suku Patopang Tonga dengan kepala suku Dt. Godang.
3. Suku Melayu Datuk Majo dengan kepala suku Dt. Majo.
4. Suku Mandailing/Maliling dengan kepala suku Dt. Sinaro.
5. Suku Melayu Palokoto dengan kepala suku Dt. Tanaro.
6. Suku Piliang dengan kepala suku Dt. Mongguong/Tumenggung.
7. Suku Domo dengan kepala suku Dt. Paduko Tuan.
8. Suku Melayu Nan Ompek kepala suku Dt. Mahudum.
9. Suku Melayu Bendang dengan kepala suku Dt. Paduko Majo.

Satu suku/pesukuan disebut juga satu Kampuong, satu kampuong terdiri dari beberapa keluarga yang masih memiliki hubung kekerabatan dari pihak ibu. Satu suku/kampuong di perintah oleh Ninik Mamak diSebut " Baompek Dalam Kampuong Balimo Jo Ughang Tuo" yaitu terdiri dari:

1. Mamak Godang Ka Naghonghi (Kepala Suku).
2. Mamak Godang Ka Kampuong.
3. Malin.
4. Dubalang.

5. Ughang Tuo.

Masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam suatu satuan hukum adat di tingkat Kampuong terhadap rakyat yang disebut dengan sebutan "Kamanakan".

4.2.6 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah Desa, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun, selanjutnya Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Daftar Kepala Desa

No	Nama	Masa Jabatan
1	Imam Kalimi	1995 s/d 2013
2	Al Anhar	2013 s/d 2019
3	Junaidi	2019 s/d sekarang

Sumber: Rincian Data dan Statistik Desa Lipatkain Selatan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat di peroleh berbagai data dari informan yang berjumlah 4 orang dalam kaitannya dengan Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan di uraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait terhadap Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk mendapatkan

gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan tingkat Pendidikan.

5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara responden di dapati jenis kelamin responden sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
Jumlah		**4**	**100 %**

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan table 5.1 di atas di lihat jumlah Informan yang di gunakan sebanyak 4 orang, mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur Informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada table 5.2 di bawah ini:

No	Tingkat Umur (tahun)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	-	-
2	31-40	1	25%
3	41-50	3	75%
4	>51	-	-
Jumlah		**4**	**100%**

Tabel 5.2 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2022.

Dari tabel 5.2 dapat di lihat bahwa jumlah Informan yang berumur antara 31-40 sebanyak 1 orang (25%), dan Informan yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang (75%).

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Adapaun Pendidikan Informan dapat di lihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	SLTA	2	50%
2	Diploma	-	-
3	Strata I	1	25%
4	Strata II	1	25%
Jumlah		**4**	**100 %**

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2022.

Pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 2 0rang (50%), Strata I 1 orang (25%), dan Strata II sebanyak 1 orang (25%).

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator yang digunakan dalam penelitian Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri yang dipaparkan sebagai berikut:

5.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Desa Lipatkain Selatan

Adapun pertanyaannya Bagaimanakah Perencanaan Kerja Lembaga Desa Lipatkain Selatan? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Perencanaan program kerja di Lembaga itu langsung dari Lembaga yang desa itu sendiri."* (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Perencanaan dibuat dan disusun melalui proses musyawarah desa yang diajukan dalam rencana kerja pembangunan desa(RKPDes)."* (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Perencanaan kerja PKK Desa Lipatkain Selatan terdiri dari dua bagian perencanaan jangka pendek (6 bulan), perencanaan kerja jangka panjang (1 tahun), perencanaan kerja jangka pendek dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan dan target yang sudah di tetapkan dan untuk jangka panjang meskipun terkadang terkendala namun perencanaan yang sudah dibuat tetap terealisasi dengan baik."* (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Lembaga Desa direncanakan melalui Forum Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa) Lipatkain Selatan."* (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Bagaimana Pengembangan Program Lembaga Desa Lipatkain Selatan? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Setiap Lembaga yang ada akan di ikut sertakan untuk pelatihan-pelatihan yang di adakan."* (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Diajukan melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran Desa."* (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Program yang sudah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diharapkan terlihat nyata dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satu contohnya posyandu, masyarakat merasakan manfaat dari program PKK Desa Lipatkain Selatan." (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Lembaga di Desa itu ada banyak bukan hanya Lembaga Adat, setidaknya ada 5 yakni Pemerintah Desa, BPD, LPM, BKAD dan BUMDesa. masing-masing dari lembaga desa itu memiliki program sesuai dengan bidang tugas dan kewenanganya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan programnya berbeda-beda pada masing-masing Lembaga Desa." (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Bagaimnakah Peningkatan SDM Lembaga Desa Lipatkain Selatan? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Melalui pelatihan, minimamal dilakukan dua kali dalam setahun seluruh Lembaga Desa di ikut sertakan dalam perencanaan Desa, dan setiap Lembaga tersebut mempunyai program sendiri." (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Dua tahun terakhir belum terlaksana karena kendala Covid-19, tahun ini sedang dalam proses perencanaan, khusus Lembaga BUMDes telah terlaksana yang dilaksanakan melalui Badan Kerjasama Desa." (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Cara meningkatkan SDM selain memiliki tingkat akademik yang sesuai pada bidangnya, mereka juga diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing atau mendatangkan tenaga ahli yang bisa memberikan ilmu sesuai kebutuhan yang bisa meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program PKK Desa Lipatkain Selatan pada pokja PKK." (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Peningkatan SDM Lembaga Desa dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :pertama, Peningkatan kapasitas melalui bimtek kelembagaan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh desa itu sendiri. Kedua, Pelaksanaan Bimtek bias dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Riau. Ketiga, Pemberdayaan SDM oleh Kepala Desa melalui alokasi dana desa." (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Desa untuk SDM di Desa tetap mengikuti prosedur dan perancanaan nya, setiap perencanaan dilakukan musyawarah rapat terlebih dahulu. Dalam upaya peningkatkatan kesejahteraan Masyarakat Desa Lipatkain Selatan perlu dilakukan pengelolaan potensi sumber daya manusia, melalui pendekatan subyektif. Pendekatan subyektif adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya.

Perlunya pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Lipatkain Selatan mengingat jumlah penduduk desa yang besar, yang merupakan sumber produktif potensial sehingga dapat diubah menjadi sumber produktif yang nyata. Demikian pula perhatian yang semakin besar oleh Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi perdesaan dan perusahaan pada masa yang akan dating.

5.2.2 Pengelolaan Teknologi di Desa Lipatkain Selatan

Adapun pertanyaannya Bagaimana Penggunaan Teknologi pada Lembaga Desa? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Setiap Lembaga yang ada memakai teknologi, dan kita pun menyediakan WiFi untuk memberikan laporan secara online."* (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Telah mampu dan dapat menggunakan komputerisasi dan internet."* (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Penggunaan teknologi sejauh ini tidak mengalami kesulitan karena SDM sudah memiliki skill dibidang yang digulatinya. Sehingga tingkat kesulitan dibidang teknologi tidak ditemukan." (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Lembaga Desa yang rutin menggunakan teknologi computer dan IT adalah Pemerintah Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa." (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Bagaimanakah Pendukung Teknologi pada Lembaga Desa? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Kita menyediakan akses internet dan personal computer." (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Akses internet cukup baik, memiliki computer dan laptop." (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Teknologi masih dalam bentuk standar, disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian PKK Desa tidak menutup kemungkinan untuk ingin memiliki teknologi canggih baik dalam upaya Desa ataupun berupa bantuan terutama dibidang UP2K yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemampuan ibu-ibu rumah tangga." (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Penggunaan teknologi sangat mendukung kualitas pelayanan di desa, agar bias lebih cepat, tepat dan terukur serta berbiaya murah." (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Bagaimanakah SDM Dalam Penggunaan Teknologi pada Lembaga Desa? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Pendukung Teknologi itu kita sediakan di Desa, seperti alat-alat posyandu seperti alat cek, yang diajukan dalam MusDes apa saja yang dibutuhkan." (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Lembaga Desa dapat memanfaatkan Teknologi, namun dibutuhkan pelatihan sesuai kebutuhan teknologi yang diamati." (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"SDM yang ada cukup berpengalaman pada bidangnya, tidak merasa kesulitan, sehingga berjalan lancer sesuai rencana kerja. Karena program PKK belum menggunakan teknologi canggih, masih seputar menggunakan Hp Android, selain untuk komunikasi dapat juga sebagai penunjang kegiatan melalui aplikasi yang ada pada smartphone."* (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"SDM pada pemerintah desa sangat mendukung dan melek teknologi computer."* (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi yang ada di Lembaga Desa cukup baik dan mendukung untuk setiap Lembaga yang ada di Desa itu sendiri. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berkepentingan untuk setiap saat memanfaatkan teknologi secara optimal.

5.2.3 Pengelolaan Akses Pasar di Desa Lipatkain Selatan

Adapun pertanyaannya Bagaimanakah Sosialisasi Lembaga Desa Kepada Masyarakat? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Yang paling banyak sosialisasi saat ini yaitu PKK dengan Posyandu, karena kegiatannya rutin.*" (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Melalui pertemuan musyawarah Desa dan spanduk atau baliho."* (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Sosialisasi Lembaga Desa sudah cukup bagus, adanya musyawarah yang dilakukan setiap Pokja, dengan memaparkan program kerja sehingga adanya feedback dari masyarakat dan ikut serta mendukung program kerja masing-masing Pokja melalui Dasawisma masing-masing Rw di Lipatkain Selatan."* (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Sosialisasi dilakukan dengan cara melaksanakan rapat-rapat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa Lipatkain Selatan."* (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Bagaimanakah Promosi Lembaga Desa? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati

selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Promosi yang dilakukan Lembaga Desa itu melalui programnya masing-masing."* (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Minim Promosi."* (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Promosi yang dilakukan melalui kegiatan Dasawisma (promosi dari mulut-kemulut), membuat spanduk, dan adanya grup di media sosial. Jadi itulah ajang promosi bagi PKK Desa Lipatkain Selatan."* (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Lembaga desa itu yang memerlukan promosi ialah BUMDesa, karena lembaga desa tersebut perlu untuk memsarkan produknya, agar menghasilkan produk yang laku di pasar dan mampu bersaing dengan competitor lainnya."* (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Apa saja yang diperlukan Lembaga Desa Lipatkain Selatan untuk meningkatkan Akses Pasar? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain

Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Dengan cara memberikan kualitas dan meningkatkan kapasitas."* (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Pelatihan dalam penguatan kapasitas dan pelatihan melalui platform marketing digital."*(Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Yaitu dengan cara memberikan kualitas terbaik dari sebuah produk yang dipasarkan, salah satu contoh pada kegiatan yang dilakukan Pokja yaitu Budi Daya ikan patin, yang dipasarkan tidak mengecewakan warga dari rasa ikan yang dipasarkan tidak berasa lumpur atau dominan pada rasa pellet yang dikonsumsi ikan."* (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Pertama ialah promosi lewat sosial media dan kedua ialah lewat pendekatan secara persuasive kepada masyarakat. Lembaga desa yang berkedudukan sebagai penggerak ekonomi adalah BUMDesa maka Bumdesa lah yang lebih banyak berperan."* (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan Akses Pasar, setiap Lembaga harus melakukan promosi lebih dan

meningkatkan kualitas produk yang ada, dan kepala desa yang merupakan pimpinan tertinggi di desa oleh karena itu kepala desa bertanggungjawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa selain itu, kepala desa juga memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa.

5.2.4 Pengelolaan Biaya di Desa Lipatkain Selatan

Adapun pertanyaannya Bagaimanakah Penggunaan Anggaran Lembaga Desa Lipatkain Selatan? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Penggunaan anggaran itu harus ada laporan kegiatan yang dilaksanakan Lembaga itu sendiri."* (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Dianggarkan melalui mekanisme penyusunan APBDes, digunakan untuk kegiatan dan operasional.*" (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Anggaran digunakan untuk kegiatan atau kebutuhan yang diperlukan oleh setiap Pokja. Contohnya ada kegiatan lomba di Pokja, segala kebutuhan yang harus dipersiapkan dipenuhi oleh PKK Desa Lipatkain Selatan."* (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Anggaran Lembaga Desa digunakan dengan prinsip transparan dan akuntabel, tertuang dalam APBDes setiap tahunnya."* (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Bagaimanakah pembiayaan Lembaga Desa di Desa Lipatkain Selatan? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Memberikan Bansos rutin, setiap Lembaga itu sebesar Rp. 4.000.000 pertahun."* (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Dianggarkan dalam APBDes."* (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Sumber dana utama dari bantuan dana ADD Desa Lipatkain Selatan sebesar Rp.4.000.000 pertahun. Kemudian melalui pengajuan proposal ke perusahaan yang ada di Desa Lipatkain Selatan." (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Masing-masing lembaga desa memiliki pos keuangan tersendiri yang mengacu kepada peraturan bupati Kampar, pembiayaan tersebut berasal dari : pertama, Bantuan Pemerintah Daerah kepada BUMDesa. Kedua, Bantuan dari ADD / APBDes. Ketiga, Bantuan dari pos PAD." (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Adapun pertanyaannya Bagaimana Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan biaya di Lembaga Desa Lipatkain Selatan? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan, Permadi, HR selaku ketua LPM Desa Lipatkain Selatan, Hendra Wati selaku ketua PKK Desa Lipatkain Selatan, dan Darli selaku ketua Lembaga Adat di Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Zaldi Ismet selaku Sekretaris Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Bendahara menyerahkan Bansos kepada ketua Lembaga yang ada di Desa, dan laporan diberikan kepada Desa, karena Desa membutuhkan SPJ." (Zaldi Ismet, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 25 Februari 2022_ 10.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Parmadi, HR selaku Ketua LPM Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

"Di alokasikan sesuai kebutuhan, selanjutnya PemDes membuat SPJ sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran." (Parmadi, HR, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 3 Maret 2022_ 16:00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Hendra Wati selaku Ketua PKK Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Pengelolaan dana dengan adanya pencatatan kas harian dan kemudian dipindahkan ke buku keuangan dan setiap bulan nya ada laporan pertanggungjawaban dari bendahara ketua PKK, artinya setiap bulan adanya audit dari ketua PKK dan pelaporan di tandatangani bendahara, diketahui ketua PKK Desa Lipatkain Selatan."* (Hendra Wati, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 7 Maret 2022_ 14.00 WIB).

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Darli selaku Ketua Lembaga Adat Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar:

> *"Pemerintah Desa adalah Lembaga Desa yang paling berwenang dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan biaya di seluruh lembaga desa. Pemerintah Desa lah yang mendistribusikan masing-masing keuangan atau pembiayaan kepada masing-masing lembaga desa."* (Darli, Lipatkain Selatan, wawancara langsung, 12 Maret 2022_ 16.00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa setiap anggaran yang diberikan Desa kepada setiap Lembaga Desa harus terealisasi dengan baik dan laporan keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan dan di laporkan kepada Desa. Dengan adanya dana Desa bagi masyarakat yang ada di desa LIpatkain Selatan membawa dampak positif, dengan adanya dana Desa tampak terlihat kemajuan Desa baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik seperti pengerasan jalan, peningkatan layanan posyandu, dan lain-lain.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan akhir tentang Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di

Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berperan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.

   Setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Desa untuk SDM di Desa tetap mengikuti prosedur dan perancanaan nya, setiap perencanaan dilakukan musyawarah rapat terlebih dahulu.

2. Meningkatkan Teknologi yang lebih canggih.

   Penggunaan teknologi yang ada di Lembaga Desa cukup baik dan mendukung untuk setiap Lembaga yang ada di Desa itu sendiri.

3. Lebih banyak melakukan Sosialisasi dan Promosi.

   Untuk meningkatkan Akses Pasar, setiap Lembaga harus melakukan promosi lebih dan meningkatkan kualitas produk yang ada.

4. Menggunakan Anggaran secara baik dengan mekanisme yang ada.

   Setiap anggaran yang diberikan Desa kepada setiap Lembaga Desa harus terealisasi dengan baik dan laporan keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan dan di laporkan kepada Desa.

6.2 Saran

Terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik, adapun saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Desa perlu digali lebih mendalam melalui beberapa pandangan lain yang lebih luas dan waktu penelitian yang lebih panjang serta pentingnya melakukan pendekatan dengan informan agar data yang ditemukan dapat lebih mendalam.

2. Peran Lembaga Desa ini diraih dengan penelitian kualitatif, maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif guna mendapatkan jawaban secara signifikan dari tujuan Lembaga Desa dengan peran yang dijalankan.

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada sekedar menemukan peran Lembaga Desa namun bisa sampai menciptakan hal-hal maupun temuan-temuan yang baru untuk peningkatan Lembaga Desa. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini menjadi bahan cambukan ataupun masukan kepada Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Masyarakat agar menjalankan dan memanfaatkan dengan baik Lembaga Desa guna terciptanya kesejahteraan Masyarakat dan Desa. Dan perlu juga diadakan pelatihan bagi para pelaksana Lembaga agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi dan tentu ini akan sangat membantu pelaksanaan kinerja yang baik.

4. Meningkatkan pengelolaan Lembaga dengan menggunakan system akuntansi sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi. Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara Lembaga Desa dengan melakukan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas

perkembangan Lembaga sehingga perkembangan Lembaga dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Desa Lipatkain Selatan, agar lebih meningkatkan unit kegiatan usaha sehingga meningkatkan pendapatan Lembaga dan dapat disalurkan ke kas Desa Lipatkain Selatan sehingga peran Lembaga Desa Lipatkain Selatan lebih terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ardana. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arsyad, Lincolin, dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.

Chandler dan Plano. 2004. dalam Yeremias T.Keban. *Enam Dimensi Strategis*

Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Gava Medi. Yogyakarta.

Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Juliantara, Dadang. (2004). *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.

Michael, Todaro. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Erlangga, Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan ketiga. CV. Alfabeta, Bandung.

Pasolong, Harbani. 2008. *KepemimpinanBirokrasi*. CV ALFABETA, Bandung.

Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Widjaja, Prof. Drs. HAW.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Abdulrahman, Wahid. 2008. *Anggota Tim Research Desa Mandiri Ilmu Pemerintahan Undip dan Assiten Pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang.*

Menteri PPN / BAPPENAS dan BPS, *Indeks Pembangunan Desa 2014*

Nafidah , L. N. & Suryaningtyas, M. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan*

Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan manajemen.

Sutoro Eko. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Lendy W Wibowo, Pejaten 23 November 2015

C. Sumber Lain / Internet

www.Wikipedia.com

www.Marianwarta1.com

DAFTAR WAWANCARA

I. Identitas Peneliti

Nama : Bima Alpajri

NPM : 170411011

Prodi : Administrasi Negara

Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Alamat : Bukit Balam, Rt/Rw 01/01, Lipatkain Selatan

No. Hp/Wa : 082370093061

Judul : Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

II. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Umur :

No. Hp/Wa :

III. Petunjuk

1. Wawancara ini hanya untuk kepentingan penelitian.
2. Wawancara ini tidak bersifat politik.

IV. Pertanyaan

A. Indikator Sumber Daya

1. Bagaimanakah perencanaan kerja Lembaga desa Lipatkain Selatan?
2. Bagaimana pengembangan program Lembaga desa Lipatkain Selatan?
3. Bagaimanakah peningkatan SDM Lembaga desa Lipatkain Selatan?

B. Indikator Teknologi

1. Bagaimana penggunaan teknologi pada Lembaga desa Lipatkain Selatan?
2. Bagaimanakah pendukung teknologi pada Lembaga desa?
3. Bagaimanakah SDM dalam penggunaan teknologi pada Lembaga desa?

C. Indikator Pasar

1. Bagaimanakah sosialisasi Lembaga desa kepada msyarakat?
2. Bagaimanakah Promosi Lembaga desa?
3. Apa saja yang diperlukan Lembaga desa Lipatkain Selatan untuk meningkatkan akses pasar?

D. Indikator Pembiayaan

1. Bagaimanakah penggunaan anggaran Lembaga desa Lipatkain Selatan?
2. Bagaimanakah pembiayaan Lembaga desa di desa Lipatkain Selatan?
3. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan biaya di Lembaga dessa Lipatkain Selatan?

Teluk Kuantan, Februari 2022

Responden

( )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama **:** Bima Alpajri

Tempat/Tanggal Lahir **:** Lipatkain, 12 Mei 1995

Jenis Kelamin **:** Laki-laki

Status **:** Belum Menikah

Pekerjaan **:** Mahasiswa

Alamat **:** Lipatkain Selatan, Kampar Kiri

Pendidikan **:**

1. Sekolah Dasar di SDN 001 Kampar Kiri Tahun 2007
2. Sekolah Menengah Pertama di MTsN Lipatkain 2010

3. Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Kampar Kiri 2013

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 2022

BIMA ALPAJRI

NPM. 170411011